

PERAN FASILITASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MISI DAGANG KE SINGAPURA TAHUN 2025

Winti Zairotul Mufariah, Slamet Muliono Redjosari

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: wintizairotulmufariah@gmail.com, smuliono@uinsa.ac.id

ABSTRACT

This study examines the role of the East Java Provincial Government as a facilitator in the 2025 trade mission to Singapore, which successfully generated the highest transaction value of Rp4.163 trillion. This study employs a descriptive qualitative method, with the East Java Provincial Government serving as the unit of analysis in its capacity as a subnational actor in international economic cooperation. Data were obtained through interviews with the Head of the Export Development Team at the East Java Industry and Trade Agency, official government documentation, and secondary data from various relevant sources. This study employs Panayotis Soldatos's concept of Paradiplomacy to analyze the role of the East Java Provincial Government as a facilitator in the 2025 trade mission to Singapore. The results indicate that the success of the trade mission is influenced not only by East Java's economic potential and Singapore's strategic position but also by the Government's role in facilitating the trade mission in a structured manner.

Keywords: *Paradiplomacy, Trade Mission, East Java, Singapore.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator dalam misi dagang ke Singapura tahun 2025 yang berhasil menghasilkan nilai transaksi tertinggi sebesar Rp4,163 triliun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan unit analisis Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai aktor subnasional dalam kerja sama ekonomi internasional. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Tim Pengembangan Ekspor Disperindag Jawa Timur, dokumentasi resmi pemerintah, dan data sekunder dari berbagai sumber relevan. Penelitian ini menggunakan Paradiplomasi dari Panayotis Soldatos untuk menganalisis peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator dalam misi dagang Singapura tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan misi dagang tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi Jawa Timur dan posisi strategis Singapura, tetapi juga oleh peran Pemerintah yang memfasilitasi misi dagang secara terstruktur.

Kata kunci: *Paradiplomasi, Misi Dagang, Jawa Timur, Singapura.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Jawa Timur dari tahun 2022 sudah menjalankan misi dagang internasional dengan berbagai negara, melalui misi dagang internasional ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dari Jawa Timur dengan pelaku usaha dari negara mitra. Pemprov Jawa Timur tidak terlibat langsung dalam transaksi, tetapi sebagai fasilitator yang menyusun strategi untuk mempertemukan pelaku usaha, membangun kepercayaan, dan menciptakan forum negosiasi yang terstruktur dan kondusif. Dalam misi dagang Jawa Timur dan Singapura yang dilaksanakan pada 13 November 2025, menghasilkan capaian transaksi tertinggi yang belum pernah terjadi sepanjang misi dagang Jawa Timur dengan negara mitra dari 2022. Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung Misi Dagang (*East Java Trade and Investment Forum*) 2025 di KBRI Singapura, 7 Chatsworth Road, misi dagang ini menghasilkan total transaksi sebesar Rp 4,163 triliun dengan 21 kesepakatan dagang antara 31 pelaku usaha Jatim dan 60 pelaku usaha Singapura (Disperindag Provinsi Jawa Timur 2025). Pencapaian tersebut menjadikan misi dagang Singapura menjadi misi dagang internasional yang mempunyai nilai transaksi tertinggi sepanjang program ini berjalan. Hasil ini lebih dari sekedar angka, pencapaian ini menandai strategi perluasan ekonomi daerah ke pasar global, dan mempertegas posisi Jawa Timur sebagai provinsi yang aktif dalam menjalankan diplomasi ekonomi sub-nasional.

Sebagai salah satu pusat re-ekspor dan hub logistik terpenting di dunia, Singapura merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai negara mitra. Menurut laporan dari World Leading Container Ports yang diterbitkan oleh DNV dan Menon Economics, Singapura merupakan salah satu pelabuhan kontainer terbesar yang menghubungkan 600 pelabuhan di seluruh dunia. Pada tahun 2024, Singapura menangani sekitar 40,9 juta TEUs dan diperkirakan akan menangani 65 juta TEUs setiap tahunnya setelah pembangunannya selesai tahun 2040-an (*"Singapore Named Top Container Port under New Global Benchmark"* 2025). Melalui peluang keuntungan yang strategis ini, produk Jawa Timur yang akan masuk ke Singapura nantinya tidak hanya dijual di pasar domestik, tetapi juga berpotensi didistribusikan kembali ke pasar internasional melalui jaringan re-ekspor Singapura. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik, Singapura merupakan mitra impor utama Indonesia di kawasan ASEAN dengan kontribusi sebesar 41,68% dari total impor Indonesia dari negara ASEAN selama 2024 (Badan Pusat Statistik 2025). Dengan pertimbangan tersebut, Singapura merupakan mitra yang strategis bagi Pemerintah Jawa Timur.

Untuk mengetahui besarnya pencapaian transaksi misi dagang dengan Singapura, perlu dibuktikan dengan melihat pencapaian misi dagang Jatim sebelumnya secara terperinci. Pada tahun 2022, misi dagang internasional sudah terlaksana dengan berbagai negara mitra, langkah ini diambil sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperluas pasar ekspor. Misi dagang yang dilaksanakan dengan Arab

Saudi tahun 2022, dengan 3 transaksi dengan nilai Rp 8,12 miliar dan Malaysia dengan 16 transaksi senilai Rp 63,63 miliar. Pada 2023, misi dagang yang dilaksanakan dengan Timor Leste dengan 9 transaksi senilai Rp 227,30 miliar dan Rp 1,101 triliun dengan 11 transaksi dengan Hongkong, yang pada saat itu dianggap sebagai rekor tertinggi sepanjang program misi dagang berlangsung. Pada tahun 2024, Jatim kembali melakukan misi dagang Jepang dengan 8 transaksi senilai Rp 332,65 miliar. Kelima misi dagang internasional ini, menghasilkan total transaksi sekitar Rp 1,733 triliun dengan 47 transaksi selama 2022-2024, dengan rata-rata nilai transaksi sebesar Rp 346,68 miliar (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025).

Pencapaian transaksi tertinggi dalam misi dagang Singapura memunculkan ketimpangan nilai transaksi dan jumlah kesepakatan. Dari sisi nilai transaksi, misi dagang ke Singapura menghasilkan Rp 4,163 triliun, sedangkan hasil ini 2,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan nilai transaksi dari lima misi dagang sebelumnya yang jika digabungkan hanya mencapai Rp 1,733 triliun. Dari sisi kesepakatan, 21 kesepakatan yang dilakukan dalam misi dagang ke Singapura, jumlah ini jauh diatas rata-rata kesepakatan dalam misi dagang sebelumnya. Ketimpangan ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor skala ekonomi negara mitra, karena Jepang yang mempunyai Produk Domestik Bruto yang jauh lebih tinggi dari Singapura, justru hanya menghasilkan 8 kesepakatan dengan nilai transaksi sebesar Rp 332,65 miliar (World Bank, 2024). Fakta tersebut memunculkan satu pertanyaan besar, bagaimana peran fasilitasi Pemerintah Jawa Timur dalam misi dagang Singapura sehingga dapat menghasilkan nilai transaksi yang tinggi dibandingkan dengan misi dagang sebelumnya?

Beberapa penelitian terdahulu masih belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian mengenai paradiplomasi di Indonesia sebagian besar berfokus pada *sister city* dan *sister province*, seperti dalam penelitian dari Mochamad Alvin dan Dina Yulianti dalam artikelnya di *Jurnal Hubungan Internasional* yang berjudul “Paradiplomasi Jawa Barat Melalui Kerja Sama Sister Province Antara Jawa Barat Dan Souss- Massa” Yang menganalisis mengenai bagaimana paradiplomasi menjadi instrumen strategis dalam kerja sama bilateral antar wilayah subnasional (Alvin and Yulianti 2024). Atau dalam penelitian yang berjudul “Paradiplomasi Multi-Sektor Dalam Kerja Sama Sister City: Studi Kasus Tanggerang Selatan dan DaeJeon” oleh Luhukay dkk dalam *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* yang membahas mengenai tantangan nyata implementasi paradiplomasi di kota berkembang (Nicholaus Harrison, Nayla Rizky, Agha Pradipta, Valin Audria Fajar 2025). Sejauh ini belum ada penelitian yang spesifik membahas mengenai analisis peran pemerintah daerah dalam forum kerja sama internasional. Karena celah tersebut, misi dagang ke Singapura 2025 menjadi layak untuk diteliti lebih dalam mengenai peran fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan literatur mengenai paradiplomasi di Indonesia masih di dominasi oleh penelitian

.

analisis peran dari paradiplomasi, belum ada yang secara khusus menganalisis strategi negosiasi pemerintah daerah dalam forum misi dagang internasional. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara langsung naskah dan materi yang digunakan Gubernur Jawa Timur dalam misi dagang ke Singapura 2025.

Kerangka Konseptual

Paradiplomasi

Di era globalisasi, hubungan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara sebagai aktor utama, tetapi pemerintah daerah seperti provinsi atau negara bagian mulai aktif terlibat dalam hubungan lintas batas negara, dengan membawa kepentingan daerah masing-masing. Fenomena ini sering kali disebut dengan paradiplomasi. Istilah paradiplomasi pertama kali dikenalkan oleh Panayotis Soldatos pada tahun 1980, sebagai penggabungan dari istilah '*parallel*' dengan '*diplomacy*' menjadi *paradiplomacy*, yang mempunyai arti kebijakan luar negeri non-pemerintah pusat (Panayotis Soldatos, 1990). Dengan meningkatnya keterlibatan aktor non- negara dalam hubungan lintas batas, mendorong adanya pergeseran peran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Soldatos menjelaskan bahwa pemerintah daerah melakukan kegiatan lintas batas negara tidak hanya sekedar acara formal, melainkan kegiatan ini bertujuan untuk membawa kepentingan daerah ke kancah internasional, paradiplomasi dilakukan dengan kunjungan resmi, kesepakatan perdagangan, investasi dan melakukan misi dagang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan kesepakatan bagi daerah (Panayotis Soldatos, 1990).

Di Indonesia, hal ini sejalan dengan UU nomor 32 Tahun 2004 pasal 42 ayat (1), mengenai kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerja sama luar negeri. Dan dipertegas dalam pasalnya bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan aktor internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004). Salah satu bentuk paradiplomasi di Indonesia dalam bidang ekonomi adalah adanya misi dagang internasional. Melalui misi dagang, pemerintah daerah menjalankan representasi kepentingan daerah dan memfasilitasi pertemuan kerjasama lintas batas, hal ini sesuai dengan paradiplomasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Soldatos.

Konsep Pradiplomasi oleh Soldatos dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator dalam misi dagang Singapura tahun 2025. Melalui perspektif paradiplomasi, Pemerintah Jawa Timur tidak berperan sebagai aktor dalam misi dagang tersebut, melainkan sebagai aktor subnasional yang berperan sebagai fasilitator pertemuan antara pelaku usaha dari Jawa Timur dengan *buyer* Singapura. Dalam hal ini, penulis menjelaskan terdapat lima

.

peran fasilitasi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, koalisi-multi aktor, kepemimpinan langsung, *business matching*, pembangunan kepercayaan, dan *market upgrading*. Kelima peran ini diartikan sebagai aktivitas paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor subnasional sejalan dengan penjelasan Soldatos, sehingga melalui kerangka paradiplomasi ini dapat menjelaskan bagaimana peran fasilitasi berjalan dalam misi dagang Singapura tahun 2025.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis peran fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam misi dagang internasional ke Singapura tahun 2025. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur hubungan kuantitatif, melainkan mendeskripsikan dan menganalisis peran fasilitasi pemerintah daerah dalam membangun kerja sama perdagangan internasional (Sugiyono, 2019).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah sub-government, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai aktor subnasional yang menjalankan aktivitas fasilitasi melalui misi dagang dengan Singapura. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipilih karena memiliki peran sebagai fasilitator dalam mempertemukan pelaku usaha Jawa Timur dengan mitra usaha dari Singapura melalui East Java Trade and Investment Forum 2025. Sementara itu, level analisis dalam penelitian ini berada pada kelompok sosial dan situasi sosial. Kelompok sosial dalam penelitian ini meliputi aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan misi dagang internasional, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pelaku usaha Jawa Timur, buyer Singapura, serta institusi pendukung lainnya. Sedangkan situasi sosial dalam penelitian ini merujuk pada proses interaksi, negosiasi, dan strategi yang berlangsung selama pelaksanaan misi dagang internasional Jawa Timur dengan Singapura tahun 2025 (Mas'oed, 1990).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Ika Devi Hardianti, S.Hub.Int. selaku Ketua Tim Pengembangan Ekspor Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Jawa Timur pada 08 Mei 2026 pukul 13.00 WIB untuk memperoleh informasi terkait strategi, mekanisme, dan pelaksanaan misi dagang Jawa Timur ke Singapura. Selain itu, dokumentasi diperoleh melalui staf Bagian Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada 07 April 2026 pukul 08.00 WIB berupa dokumen resmi seperti naskah sambutan dan materi presentasi Gubernur Jawa Timur yang digunakan dalam *East Java Trade and Investment*

.

Forum 2025 di Singapura. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, laporan resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, data Badan Pusat Statistik (BPS), situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pemberitaan dari media terpercaya yang relevan dengan penelitian.

Teknik validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi pemerintah, dan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data penelitian (Sugiyono, 2019)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, dan Saldaña 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan strategi Pemprov Jawa Timur dalam misi dagang internasional ke Singapura. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk deskriptif untuk mempermudah proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Aktor Paradiplomasi dalam Misi Dagang Singapura 2025

Keterlibatan Pemprov Jawa Timur dalam forum *East Java Trade and Investment 2025* yang berlangsung di Singapura tidak lepas dari posisi Pemprov Jawa Timur sebagai aktor subnasional yang melakukan paradiplomasi dalam bidang ekonomi. Dalam misi dagang ini, posisi Pemprov Jawa Timur tidak hadir sebagai pelaku utama dalam transaksi bisnis, melainkan sebagai fasilitator yang mempertemukan pelaku usaha dari Jawa Timur dengan *buyer* dari Singapura untuk melakukan pertemuan dan negosiasi dengan kondisi forum yang kondusif. Posisi ini sesuai dengan penjabaran paradiplomasi Soldatos, di mana pemerintah daerah merupakan aktor subnasional dapat melakukan dan terlibat dalam hubungan internasional, seperti melaksanakan kerjasama ekonomi lintas batas negara meski tidak terlibat langsung sebagai pelaku bisnis utama yang melakukan kesepakatan.

Misi dagang Jawa Timur dengan Singapura bukan kerja sama ekonomi yang dilakukan pertama kalinya, hubungan dagang antara keduanya sudah terjalin cukup lama dan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi pengekspor utama ke Singapura jauh sebelum misi dagang 2025 dilakukan, hal ini ditandai dengan surplus perdagangan Jawa Timur-Singapura pada periode Januari-Agustus 2025 mencapai \$379,19 juta dengan total nilai ekspor non-migas mencapai \$845,53 juta (Disperindag Provinsi Jawa Timur

2025). Pengalaman ini menjadi acuan bagi Pemerintah Jawa Timur dalam misi dagang 2025, karena delegasi yang hadir bukan mitra baru, tetapi mitra lama yang membawa tawaran yang lebih strategis.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga menjadi aktor yang aktif membangun hubungan lintas batas sesuai dengan kepentingan daerahnya. Dalam hal ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa hadir dalam Misi Dagang (*East Java Trade and Investment Forum*) 2025 di KBRI Singapura, 7 Chatsworth Road. Kehadiran langsung Gubernur dalam forum tersebut menunjukkan adanya dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha daerah dan selain itu, forum ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai ruang negosiasi dan promosi ekonomi yang lebih terstruktur untuk memperluas akses pasar internasional bagi pelaku usaha Jawa Timur.

Sebagai aktor subnasional, Pemprov Jawa Timur tidak mempunyai otoritas penuh sebagai perwakilan pemerintah pusat, tetapi dalam kerangka otonomi daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, pemerintah daerah mempunyai ruang dalam melakukan kerja sama ekonomi internasional secara terencana dan sesuai dengan kepentingan nasional (Pemendagri Nomor 25 Tahun 2020). Dengan keterbatasan otoritas tersebut, Pemprov Jawa Timur terus mendorong melalui peran fasilitasnya yang terstruktur dalam setiap kerja sama internasional.

Keberhasilan misi dagang Singapura tahun 2025 dengan total transaksi mencapai Rp4,163 triliun menunjukkan bahwa capaian tersebut tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui peran Pemprov Jawa Timur sebagai fasilitator yang disusun secara terstruktur. Peran tersebut terlihat melalui pembangunan jaringan kerja sama antaraktor, *business matching*, pembangunan kepercayaan dengan mitra usaha Singapura, hingga penyesuaian komoditas dengan kebutuhan pasar internasional. Dengan demikian, keberhasilan misi dagang ini tidak hanya mencerminkan tingginya potensi ekonomi Jawa Timur, tetapi juga menunjukkan adanya peran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas kerja sama ekonomi lintas negara.

5 Peran Fasilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Misi Dagang ke Singapura 2025

Keberhasilan pada misi dagang luar negeri dengan Singapura yang mencapai nilai transaksi sebesar Rp 4,163 triliun tidak lepas dari peran fasilitas Pemerintah Jawa Timur. Dalam kerangka paradiplomasi oleh Soldatos, hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi kunjungan resmi, kerja sama internasional, negosiasi dan fasilitasi pertemuan antara pelaku usaha daerah dengan mitra internasional. Berdasarkan analisis data penelitian, terdapat lima peran fasilitasi yang dijalankan oleh Pemprov Jatim dalam misi dagang Singapura. Adapun peran tersebut adalah:

a. Koalisi Multi-Aktor

Koalisi multi-aktor merujuk pada keterlibatan beberapa aktor yang mempunyai kepentingan dan peran yang berbeda, baik dari pemerintah daerah, lembaga pusat dan perwakilan diplomatik. Hal ini diterapkan juga dalam *East Java Trade and Investment Forum 2025*, dimana forum ini diselenggarakan oleh Atase Perdagangan Singapura yang bekerjasama dengan *Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)* Singapura, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KBRI Singapura dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Ratih Kusumawanti 2025). Keterlibatan dari berbagai aktor ini menggambarkan bahwa Pemprov Jawa Timur tidak berjalan dengan sendiri, tetapi bersama-sama untuk memperkuat hubungan dagang antara Indonesia dan Singapura. Dalam wawancaranya, ketua tim Pengembangan Ekspor Disperindag Jawa Timur, Ika Devi Hardianti S.Hub.Int. menyampaikan bahwa 31 pelaku usaha dari Jawa Timur ini dibagi menjadi dua kategori, mandiri dan difasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur. Terdapat 3 Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang difasilitasi oleh pemerintah dengan melewati beberapa seleksi ketat dan biasanya untuk kategori fasilitasi diperuntukkan bagi kategori kecil menengah, sedangkan untuk kategori mandiri terdiri dari 23 pelaku usaha dan tidak dibatasi pendaftarannya dengan 6 pelaku usaha lainnya berada di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur.

Melalui kategori fasilitasi ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Jawa Timur membuka akses bagi seluruh pelaku usaha yang tidak mampu hadir secara mandiri untuk memperluas pasarnya di kancah internasional. Sedangkan untuk kategori mandiri, misi dagang tidak hanya diartikan sebagai kegiatan pemerintahan tetapi merupakan forum yang menarik bagi pelaku usaha dalam melihat peluang pasar yang bernilai. Pemprov Jawa Timur berperan sebagai fasilitator bagi para pelaku usaha yang ada di Jawa Timur baik dalam skala kecil menengah atau skala tinggi untuk memberikan ruang bagi mereka supaya mendapatkan akses ke pasar internasional lebih luas.

Dengan adanya misi dagang ini, forum negosiasi antar pelaku usaha dapat berjalan lebih terstruktur dan kondusif. Karena dengan adanya koalisi multi-aktor pada misi dagang 2025, menunjukkan bahwa forum didukung oleh lembaga struktur yang kuat, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan antar pelaku usaha. Keterlibatan berbagai aktor dan pelaku usaha menunjukkan adanya integrasi jaringan kerja sama dalam misi dagang internasional. Melalui koalisi multi-aktor ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak berjalan sendiri, tetapi membangun struktur kerja sama yang mampu meningkatkan kredibilitas forum dan memperkuat kepercayaan antar pelaku usaha.

b. Kepemimpinan Langsung

Dalam *East Java Trade and Investment Forum 2025*, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir dan terlibat dalam forum tersebut. Dengan kepemimpinan langsung dari Gubernur menandai bahwa keputusan tersebut berdampak pada hubungan kerja sama Jawa Timur dan Singapura dalam bidang ekonomi dan investasi. Selain itu, Gubernur Khofifah juga memperluas agenda diplomatiknya seperti bertemu Senior Minister Singapura Lee Hsien Loong dalam program *Rising Fellowship* dan Menteri Luar Negeri Singapura H.E Vivian Balakrishnan untuk membahas lebih lanjut mengenai penguatan kerja sama strategis jangka panjang (DPMPSTP Jawa Timur 2025).

Keterlibatan langsung Gubernur sebagai otoritas pengambilan keputusan tertinggi di Provinsi memberikan dampak pada kesepakatan yang terjal, karena setiap kesepakatan yang dihasilkan tentu mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Perpres Nomor 33 Tahun 2018). Hal tersebut mempengaruhi perspektif *buyer* Singapura yang akan melakukan transaksi dagang dengan pelaku usaha dari lintas batas untuk meminimalisir adanya kegagalan dalam kerja sama. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, terbukti dapat meningkatkan kepercayaan mitra dan mempercepat keberhasilan kesepakatan (Zhang 2024). Keterlibatan langsung Gubernur Jawa Timur dalam forum perdagangan internasional menunjukkan adanya upaya membangun legitimasi dan kepercayaan dalam kerja sama ekonomi lintas negara. Kehadiran langsung Gubernur berfungsi sebagai bentuk *political assurance* yang meningkatkan rasa aman *buyer* Singapura dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha Jawa Timur.

c. Business Matching

Business Matching merupakan salah satu fasilitas yang diterapkan oleh Pemprov Jawa Timur dengan mempertemukan kedua pelaku usaha dari Jawa Timur dan Singapura. Ika Devi Hardianti menyampaikan bahwa sebelum para pelaku usaha bertemu secara langsung, Disperindag melakukan *Business Matching* untuk mempertemukan kedua pelaku usaha melalui *Zoom Meeting*, dan pada misi dagang Singapura, *buyer* dari Singapura lebih memilih untuk melakukan pertemuan secara langsung. Tujuannya adalah untuk mempercepat terbentuknya kesepakatan kerja sama yang biasanya terhalang oleh jarak, komunikasi dan kepercayaan yang biasanya terjadi dalam kerja sama lintas batas. Dalam konteks perdagangan, strategi ini digunakan dalam skema *buying mission* karena dinilai dapat meningkatkan efektivitas promosi dengan mempertemukan kedua pihak secara langsung dan terstruktur.

Strategi ini sebelumnya sudah digunakan pada banyak kerja sama perdagangan Indonesia. Salah satu contohnya adalah kerja sama bilateral antara Indonesia-Malaysia 2021-2022, pelaku usaha Malaysia melakukan kunjungan langsung pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti Manado dan Probolinggo, guna untuk mempertemukan dengan pelaku usaha dari

Indonesia dan melakukan peninjauan lokasi produksi (Afra Vovianty, Nur Azizah 2024).

Dengan adanya strategi *bussines matching*, memungkinkan adanya interaksi secara langsung dari kedua pelaku usaha dan sekaligus memberikan ruang untuk melakukan negosiasi awal dibandingkan melakukan promosi dengan pameran. Pada misi dagang Singapura 2025, Jawa Timur dan Singapura memberikan fasilitas pertemuan langsung bagi 31 pelaku usaha Jawa Timur dengan 60 Pelaku Usaha dari Singapura di KBRI Singapura, 7 Chatsworth Road. Ika Devi Hardianti menyatakan bahwa meski ini pertemuan perkali bagi kedua pelaku usaha, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa pelaku usaha dari Jawa Timur sudah ada yang melakukan kontak dengan *buyer* Singapura sehingga misi dagang dijadikan sebagai forum pertemuan. Selain itu, untuk beberapa level UMKM masih ada beberapa yang masih belum mengenal *buyer* Singapura sehingga forum ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan produknya. *Business matching* menunjukkan adanya upaya integrasi jaringan bisnis antara pelaku usaha Jawa Timur dan Singapura melalui forum yang difasilitasi pemerintah.

d. Prosititioning dan Pembangunan Kepercayaan

Dalam materi dan naskah sambutan yang dipakai oleh Gubernur Khofifah yang berjudul “*Trade Mission and Investmen: Fostering Stronger Connectivity between East Java Province and Singapore*”, analisis penulis menunjukkan Pemprov Jatim tidak hanya memposisikan forum tersebut sebagai forum promosi produk, tetapi sebagai langkah awal pembentukan posisi tawar sebelum negosiasi berlangsung. Hal ini terbukti dengan struktur materi yang lebih memaparkan data makroekonomi dibandingkan dengan langsung menawarkan produk atau komoditas. Pemaparan materi diawali dengan menampilkan pertumbuhan ekonomi menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, mencapai 5,23% yang melampaui rata-rata nasional, kontribusi Jawa Timur sekitar 14,44% pada PBD nasional, dan nilai ekspor Jawa Timur pada periode Januari sampai September 2025 dengan di dominasi oleh ekspor non-migas sebesar 97,98% (BPS Provinsi Jawa Timur 2025).

Pemaparan data makroekonomi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi berfungsi untuk membangun kepercayaan (*trust-building*) sebelum proses negosiasi berlangsung. Dengan memaparkan kondisi ekonomi yang kuat, Pemprov Jawa Timur secara tidak langsung meningkatkan daya tarik sebagai mitra kerjasama jangka panjang. Selain itu, pemaparan diperkuat lagi dengan posisi Jawa Timur sebagai hub logistik nasional, melalui Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 21 dari 39 rute tol laut nasional, sekaligus memasok 80% kebutuhan logistik ke 19 provinsi yang ada di Indonesia Timur (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025). Penekanan pada aspek ini menunjukkan bahwa Pemprov Jawa Timur tidak hanya memasok komoditas, tetapi menawarkan posisi yang strategis sebagai *gateway economy*.

Pemaparan materi ini berdampak pada keberhasilan kesepakatan yang tidak terbatas pada komoditas unggulan seperti perhiasan dan tembakau, tetapi lebih luas pada komoditas baru seperti produk kecantikan, karbon, bioteknologi dan aplikasi digital (Willi Irawan 2025). Peningkatan kesepakatan kerja sama ini menunjukkan bahwa sebuah proses negosiasi tidak dapat ditentukan hanya melalui daya tarik produk, tetapi juga melalui kepercayaan pada mitra kerja sama. Pemaparan data makroekonomi dan posisi strategis Jawa Timur menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya menawarkan komoditas, tetapi juga membangun citra sebagai mitra ekonomi yang stabil dan strategis.

e. Market Upgrading

Market Upgrading merujuk pada proses meningkatkan kualitas dan cakupan pasar yang sudah ada ke dalam nilai yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai transaksi yang lebih besar dibandingkan pasar sebelumnya. Misi dagang Singapura 2025 yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur merupakan sebuah langkah untuk memperkuat hubungan dagang dan ekonomi dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Misi dagang ini bukan sesuatu yang benar-benar baru bagi Jawa Timur, forum ini dimanfaatkan untuk mengembangkan hubungan ekonomi yang sebelumnya sudah pernah terjadi dan sebuah langkah lanjutan untuk meningkatkan intensitas kerja sama.

Meskipun disebut sebagai langkah lanjutan, akan tetapi fokus kerja samanya telah berkembang dari yang sebelumnya dominan pada ekspor barang industri biasa, sekarang meningkat pada komoditas yang mempunyai nilai lebih tinggi seperti, perdagangan karbon, bioteknologi, dan produk skincare dan parfum. Komoditas yang ditawarkan dalam misi dagang ini berbeda dengan pola kerja sama sebelumnya yang hanya fokus pada hasil pertanian, perikanan, perhiasan dan makanan. Selain itu Pemprov Jawa Timur melihat kebutuhan masyarakat Singapura dan menyesuaikan dengan tren pasar saat ini. Masyarakat Singapura lebih berminat pada produk dengan kualitas tinggi sehingga Pemprov Jawa Timur menyesuaikan dengan menawarkan perdagangan karbon dan tidak hanya menawarkan produk bahan mentah.

Komoditas-komoditas yang baru seperti perdagangan karbon ini tidak dipilih begitu saja, melainkan dengan melihat kondisi di mana Singapura merupakan negara dengan wilayah hutan yang terbatas, sehingga membutuhkan kredit karbon untuk mencapai target *sustainability* untuk melakukan penyerapan karbon secara alami. Sedangkan dalam bidang bioteknologi, Singapura mengembangkan ekonomi berbasis teknologi dan inovasi yang membutuhkan bioteknologi untuk mendukung pengembangan industri modernnya seperti *food biotechnology* untuk tetap bisa mempertahankan kestabilan pangannya. Pergeseran komoditas dari produk konvensional menuju perdagangan karbon, bioteknologi, dan produk kecantikan menunjukkan adanya penyesuaian dari Pemprov dengan

memanfaatkan kebutuhan pasar Singapura yang lebih berorientasi pada sustainability dan teknologi tinggi.

Analisis Peran Fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Kerangka Paradiplomasi Soldatos

Berdasarkan temuan empiris yang telah dipaparkan, kelima peran fasilitasi yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam East Java Trade and Investment Forum 2025 dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui kerangka paradiplomasi Soldatos (1990). Soldatos menjelaskan bahwa aktivitas internasional pemerintah daerah sebagai aktor subnasional tidak bersifat sporadis, melainkan merupakan hasil dari kapasitas kelembagaan, kepemimpinan politik lokal, dan pembacaan peluang eksternal yang dilakukan secara terencana. Dalam konteks ini, kelima peran fasilitasi Pemprov Jawa Timur bukan sekadar rangkaian kegiatan teknis penyelenggaraan forum, melainkan cerminan dari bagaimana aktor subnasional menjalankan aktivitas paradiplomasi secara konkret untuk memperluas kepentingan ekonomi daerahnya di tingkat internasional.

Kepemimpinan langsung Gubernur dan koalisi multi-aktor mencerminkan kapasitas kelembagaan Pemprov Jawa Timur sebagai aktor paradiplomasi yang matang. Soldatos (1990) menekankan bahwa kapasitas pemerintah daerah untuk menjalankan aktivitas internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan kepemimpinan politik lokal dan kemampuan membangun koalisi dengan aktor-aktor pendukung. Kehadiran langsung Gubernur Khofifah dalam forum sekaligus agenda diplomatiknya dengan Senior Minister Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura menunjukkan bahwa Pemprov Jawa Timur mampu menempatkan diri bukan hanya sebagai penyelenggara forum perdagangan, tetapi sebagai aktor subnasional yang diakui legitimasinya oleh mitra internasional setingkat pejabat tinggi negara. Aktivitas paradiplomasi mencakup interaksi langsung yang dilakukan oleh pemimpin subnasional dengan berbagai aktor lintas batas, baik swasta, non-pemerintah, maupun pemerintah di tingkat nasional dan subnasional, serta partisipasi dalam jaringan transnasional yang semakin kompleks. Koalisi multi-aktor yang melibatkan KBRI Singapura, IIPC, BKPM, dan KADIN memperkuat kapasitas ini dengan menghadirkan struktur kelembagaan yang solid di balik forum, sehingga meningkatkan kredibilitas Pemprov Jawa Timur di mata buyer internasional.

Business matching dan *positioning* merupakan dua peran yang secara langsung mencerminkan fungsi fasilitasi inti dari paradiplomasi subnasional. Dalam kerangka Soldatos (1990), salah satu elemen aktivitas paradiplomasi yang paling konkret adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menciptakan forum negosiasi yang kondusif bagi pelaku usaha domestik dalam berinteraksi dengan mitra internasional. Misi dagang pada dasarnya adalah fasilitasi bisnis bagi perusahaan melalui pertemuan tatap muka dengan calon buyer, yang merupakan alat yang terbukti efektif dan hemat

biaya untuk membantu pelaku usaha mempelajari pasar luar negeri secara langsung. Business matching tatap muka yang difasilitasi Pemprov Jawa Timur dalam forum ini melampaui fungsi teknis semata, karena keputusan buyer Singapura untuk bertemu langsung dibandingkan secara daring menunjukkan adanya kepercayaan awal yang sudah terbangun terhadap forum yang diselenggarakan pemerintah daerah. Sementara itu, positioning melalui pemaparan data makroekonomi Jawa Timur menunjukkan bahwa Pemprov Jawa Timur tidak hanya memfasilitasi pertemuan, tetapi juga secara aktif membangun narasi tentang Jawa Timur sebagai mitra ekonomi yang kredibel dan strategis sebelum negosiasi bisnis berlangsung.

Market upgrading sebagai peran kelima menunjukkan dimensi paradiplomasi yang paling strategis, yaitu kemampuan pemerintah daerah membaca peluang eksternal dan menerjemahkannya ke dalam penawaran yang relevan bagi mitra internasional. Soldatos (1990) menjelaskan bahwa aktivitas paradiplomasi yang efektif tidak hanya bergantung pada kapasitas internal, tetapi juga pada kemampuan membaca interdependensi ekonomi global dan posisi strategis negara mitra. Pergeseran komoditas dari produk konvensional menuju perdagangan karbon, bioteknologi, dan produk kecantikan bukan merupakan keputusan yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari pembacaan cermat terhadap kebutuhan Singapura sebagai negara dengan keterbatasan sumber daya alam tetapi memiliki orientasi ekonomi berbasis sustainability dan teknologi tinggi (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, 2025). Kemampuan ini menunjukkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah menjalankan paradiplomasi tidak hanya pada tataran prosedural, tetapi juga pada tataran strategis dalam memposisikan Jawa Timur sebagai mitra yang relevan dan kompetitif di pasar internasional.

Analisis kelima peran fasilitasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan misi dagang Singapura 2025 merupakan hasil dari aktivitas paradiplomasi subnasional yang dijalankan secara terencana dan berlapis oleh Pemprov Jawa Timur. Setiap peran fasilitasi yang dijalankan saling melengkapi dan membentuk satu ekosistem forum yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan dagang. Temuan ini memperkuat argumen Soldatos (1990) bahwa pemerintah daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat, kepemimpinan politik yang aktif, dan kemampuan membaca peluang eksternal secara cermat mampu menjalankan aktivitas paradiplomasi yang menghasilkan output ekonomi nyata bagi daerahnya. Dengan demikian, misi dagang bukan sekadar forum perdagangan biasa, melainkan instrumen paradiplomasi ekonomi subnasional yang, ketika dijalankan dengan peran fasilitasi yang tepat, mampu menghasilkan nilai transaksi yang melampaui misi dagang manapun dalam sejarah Jawa Timur.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan peran fasilitasi sebagai aktor paradiplomasi subnasional dalam *East Java Trade and Investment Forum 2025* di Singapura melalui lima peran yang saling melengkapi. Kelima peran tersebut adalah kepemimpinan langsung oleh gubernur Jawa Timur, koalisi multi-aktor, *business matching*, *trust building*, *market upgrading*. Melalui kelima peran ini, Pemprov Jawa Timur tidak bertindak langsung sebagai pelaku bisnis utama, melainkan sebagai fasilitator yang membangun kondisi, jaringan dan forum yang kondusif bagi pelaku usaha Jawa Timur untuk bertemu *buyer* internasional dari Singapura. Hal ini sejalan dengan konsep paradiplomasi Soldatos (1990) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai aktor subnasional dapat melakukan aktivitas internasional secara langsung dalam batas kewenangannya untuk memperluas kepentingan ekonomi daerah.

Keberhasilan misi dagang Singapura 2025 yang menghasilkan transaksi sebesar Rp4,163 triliun dengan 21 kesepakatan dagang yang merupakan buktibahwa peran fasilitasi pemerintah daerah menghasilkan hasil yang nyata pada misi dagang Singapura. Temuan ini mengisi gap dalam literatur paradiplomasi Indonesia yang kebanyakan membahas mengenai *sister city* dan *sister province*, dengan menunjukkan bahwa misi dagang internasional merupakan instrumen paradiplomasi subnasional yang efektif ketika pemerintah daerah melakukan secara terstruktur dan terencana.

Daftar Pustaka

- Afra Vovianty, Nur Azizah, Syarifah. 2024. "Strategi KBRI Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Total Perdagangan Bilateral Indonesia-Malaysia Tahun 2021-2022" 7 (1): 122-34.
- Alvin, Mochamad, and Dina Yulianti. 2024. "Paradiplomasi Jawa Barat Melalui Kerja Sama Sister Province Antara Jawa Barat Dan Souss-Massa." *Jurnal Hubungan Internasional* 17 (1): 122-34.
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2024*, Buku I. Vol. 42.
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2025. "Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto Triwulan III-2025."
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 2025. "Misi Dagang Jatim-Singapura 2025 Tembus Rp 4,16 Triliun, Catatan Tertinggi Sepanjang Kerja Sama Dengan Negara Mitra." Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 2025. <https://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=misi-dagang-jatim-singapura-2025-tembus-rp-4-16-triliun-catatan-tertinggi-sepanjang-kerja-sama-dengan-negara-mitra>.
- Nicholaus Harrison, Nayla Rizky, Agha Pradipta, Valin Audria Fajar, Freesia Aryunia Zafilia Basalama Luhukay. 2025. "Paradiplomasi Multi-Sektor Dalam Kerja Sama Sister City: Studi Kasus Tangerang Selatan Dan Daejeon." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9 (6).
- Panayotis Soldatos. 1990. "En Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-Policy Actors." In *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*, edited by Hans J. Michelmann & Panayotis Soldatos, 34-53. Oxford University Press.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2025. "East Java Province & Singapore."
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri." 2020.
- "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018." n.d.
- Ratih Kusumawanti. 2025. "Produk Pertanian Dan Rempah Jatim Tembus Pasar Singapura." *Portonews*. 2025. <https://portonews.com/2025/keuangan-dan-portfolio/perdagangan-dan-jasa/produk-pertanian-dan-rempah-jatim-tembus-pasar-singapura/>.

MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 9 Oktober 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

- “Singapore Named Top Container Port under New Global Benchmark.” 2025. EDB Singapore. 2025. <https://www.edb.gov.sg/en/business-insights/insights/singapore-named-top-container-port-under-new-global-benchmark.html>.
- Timur, DPMPTSP Jawa. 2025. “Program Rising Fellowship, Gubernur Khofifah Bertemu Senior Minister HE. Lee Hsien Loong Bahas Banyak Hal Strategis.” DPMPTSP Jawa Timur. 2025.
- “Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, SETNEG, Tahun 2004.” n.d.
- Willi Irawan. 2025. “Misi Dagang Jatim-Singapura Catat Transaksi Rp4 Triliun Lebih.” Antara News. 2025. <https://jatim.antaranews.com/amp/berita/1002229/misi-dagang-jatim-singapura-catat-transaksi-rp4-triliun-lebih>.
- World Bank. 2024. “GDP (Current US\$) – Japan.” 2024. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=JP>.
- Zhang, Zhongqi. 2024. “Research on Negotiation Strategies and Challenges in International Business Transactions.” Warmick Evans Publishing 11.